

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan organisasi besar yang digerakkan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan kumpulan pihak terstruktur yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terstruktur berarti pemerintah memiliki level atau tingkatan yang berjenjang mulai dari level kementerian/lembaga hingga unit satuan kerja. Untuk menggerakkan sebuah organisasi, pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program kerja yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membutuhkan sumber daya seperti, SDM, sarana dan prasarana, dan uang. Uang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program kerja. Dengan adanya uang, pemerintah dapat melaksanakan belanja untuk menjalankan program kerja yang akan menghasilkan *output* dan memberikan dampak (*outcome*) bagi rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja merupakan pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya nilai kekayaan bersih (INDONESIA, 2003). Sejak dua dekade lalu, Indonesia

telah menerapkan kebijakan defisit anggaran, pos belanja lebih besar daripada pos pendapatan. Saat ini, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan besar-besaran demi menciptakan Indonesia maju 2045. Namun, pemerintah perlu menyadari bahwa besarnya anggaran yang dicadangkan untuk belanja harus digunakan secara bijak dan penuh dengan kehati-hatian karena terbatasnya sumber pendapatan Indonesia yang disokong oleh besarnya sumber pembiayaan, artinya anggaran belanja yang saat ini dimiliki oleh pemerintah harus dikembalikan lagi suatu saat di masa mendatang.

Pada tahun 2017 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PMK NOMOR 197/PMK.05/ 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pemerintah terkhusus unit satuan kerja diharapkan bisa melakukan perencanaan yang matang dan merealisasikan anggaran yang direncanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, pemerintah masih memerlukan proses yang cukup lama untuk mewujudkannya. Di Indonesia masih sering dijumpai anggaran yang tidak terserap dengan baik dan tren penyerapan anggaran yang rendah di kuartal I serta lonjakan penyerapan anggaran di kuartal IV.

Pada tahun 2020, Derrida Rizky Oktadiona telah melakukan tinjauan atas realisasi belanja negara berdasarkan rencana penarikan dana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Penulis terdahulu ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan RPD di lapangan, kesulitan dalam merealisasikannya, dan apa upaya yang dilakukan oleh satker tersebut untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penulisan

karya tulis sebelumnya bertujuan untuk menggambarkan realisasi belanja negara berdasarkan RPD Kanwil DJPb Provinsi DIY dan menguraikan upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi DIY untuk memaksimalkan penarikan dana. Adapun kesimpulan atas tinjauan sebelumnya berupa Kanwil DJPb Provinsi DIY belum bisa merealisasikan anggaran secara sempurna, 91,57%. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuasi jumlah pegawai lembur setiap hari, terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, dan perubahan jumlah peserta sosialisasi. Tingkat realisasi 91,57% diperoleh Kanwil DJPb Provinsi DIY setelah melakukan penyesuaian RPD bulanan pada akhir triwulan (Oktadiona, 2020). Penulisan terdahulu memiliki kesamaan dalam hal kerangka berpikir. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan tahun tinjauan realisasi.

Pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk meninjau bagaimana tren realisasi belanja, apakah terdapat kesulitan, serta bagaimana satker mengatasi hal tersebut. Kegiatan ini akan dilakukan pada satuan kerja KPPN Pematangsiantar dan hasil tinjauannya akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan Realisasi Belanja atas Rencana Penarikan Dana pada KPPN Pematangsiantar”

1.2. Rumusan Masalah

Sebelum melakukan tinjauan, penulis memiliki tiga pertanyaan utama, yaitu:

- a) Bagaimana realisasi belanja atas RPD pada KPPN Pematangsiantar?
- b) Apa permasalahan yang dihadapi KPPN Pematangsiantar dalam merealisasikan rencana belanjanya?

- c) Bagaimana upaya KPPN Pematangsiantar untuk meningkatkan realisasi belanjanya?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui bagaimana realisasi belanja atas RPD pada KPPN Pematangsiantar;
- b) Mengetahui apa permasalahan yang dihadapi KPPN Pematangsiantar dalam merealisasikan rencana belanjanya;
- c) Bagaimana upaya KPPN Pematangsiantar untuk meningkatkan realisasi belanjanya.

1.4. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada tinjauan realisasi belanja atas rencana penarikan dana pada KPPN Pematangsiantar sejak tahun 2019 hingga 2021. Penulis memilih KPPN Pematangsiantar sebagai objek penulisan karena saat penulisan karya tulis ini penulis berdomisili di Kota Pematangsiantar. Selain itu, penulis juga merasa lebih nyaman bila memilih objek berupa satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam memperoleh data penelitian baik primer maupun sekunder. Untuk periodenya, penulis menggunakan interval waktu mulai 2019 hingga 2021. Hal ini didasarkan pada keinginan penulis untuk melihat bagaimana perbandingan realisasi belanja serta bagaimana upaya KPPN Pematangsiantar dalam menghadapi perubahan yang luar biasa (Covid-19). Selain itu, alasan terbaru menjadi penyebab pendukung dari pemilihan periode tersebut.

1.5. Manfaat Penulisan

Penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca (penulis dan/atau pihak lain) sebagai penambah pengetahuan bagaimana sebenarnya realisasi belanja atas RPD yang sudah direncanakan satuan kerja. Selain itu, penulis juga berharap karya tulis ini dapat bermanfaat sebagai masukan atas kendala-kendala yang dihadapi baik satker yang penulis tinjau ataupun satker lainnya yang menghadapi kendala yang serupa.

1.6. Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir (KTTA) ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari subbab-subbab yang penulis susun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian secara umum karya tulis ilmiah mulai dari latar belakang penulisan, masalah inti yang ingin ditinjau penulis, tujuan penulisan karya tulis, batasan-batasan yang penulis terapkan, manfaat tulisan ini hingga sistematika atau susunan karya tulis yang penulis terapkan. Latar belakang berisi penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari dilaksanakannya tinjauan. Sementara itu, bagian masalah inti dan tujuan penulisan berisi permasalahan serta tujuan dari diadakannya tinjauan. Bagian pembatasan merupakan titik-titik pembatas yang penulis tetapkan agar pembahasan tidak meluas kemana-mana. Berikutnya ialah bagian manfaat. Bagian ini berisi manfaat dari tinjauan yang penulis hasilkan. Terakhir, bagian sistematika penulisan, bagian yang berisi urutan penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat dasar-dasar atau teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam meninjau masalah pada objek. Penulis menggunakan landasan teori berupa undang-undang, peraturan menteri keuangan, dan modul pengelolaan kas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga subbab, yaitu subbab metode pengumpulan data, subbab gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Subbab metode pengumpulan data berisi uraian metode penulisan yang penulis gunakan berupa studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Subbab gambaran umum objek penulisan memuat sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi KPPN Pematangsiantar. Subbab pembahasan hasil berisi uraian realisasi belanja atas RPD, permasalahan serta upaya KPPN dalam mengatasi permasalahan atas ketidaktepatan sasaran penyerapan anggaran pada periode 2019, 2020, dan 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bagian terakhir dari KTTA ini ialah bab simpulan. Bab ini berisi simpulan realisasi belanja atas RPD, permasalahan, serta upaya KPPN Pematangsiantar dalam mengatasi permasalahan tersebut pada periode 2019, 2020, dan 2021.